

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan pendidikan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada tema pembangunan II (2010--2015), visi Kemendiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang: (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Keterkaitan antara landasan konstitusi dengan upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional sebagai titik tolak dari rencana strategi, Departemen Pendidikan Nasional telah meletakkan dasar kebijakan, mencakup: (1) perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) peningkatan produktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam suatu pengaturan (*good governance*) pendidikan nasional di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, adanya semangat yang menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan kualitas manusia yang berorientasi global. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, mulai dari kebijakan, regulasi, lembaga penjaminan mutu, dan asosiasi yang mempunyai peran untuk melakukan pengawalan dan pengendalian mutu pendidikan

Kebijakan pemerintah dalam rangka mengawal kualitas pendidikan tahun 2006, mengeluarkan Permen 22 tentang Standar Isi, Permen 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi, Permendiknas No. 19 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, Permendiknas 20 tahun 2007 Tentang Standar Penilaian, serta Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan. Semua standar tersebut harus ditingkatkan secara berencana, berkala dan berkesinambungan agar pelaksanaan 8 (delapan) standar tersebut makin meningkat kualitasnya. Dalam pengembangan program mutu pendidikan, pengendalian mutu (*quality control*) memegang peranan yang sangat penting. Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Sebagaimana dikemukakan oleh Syaodih (2003: 13) bahwa “untuk keberhasilan pengendalian mutu pendidikan di sekolah maka ada dua hal yang perlu diusahakan yaitu adanya perencanaan dan struktur organisasi yang jelas, sistem dan teknik-teknik pengendalian dapat dikembangkan dari perencanaan yang telah dibuat”.

Layanan prima pendidikan nasional yang berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri itu dapat dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan di setiap jenjang. Di jenjang sekolah menengah, hal ini diupayakan dengan tujuan strategisnya, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu yang lebih terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini secara khusus diatur pada Pasal 91 yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut.

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi penting untuk memantau dan memastikan setiap program/jurusan dan institusi satuan pendidikan diselenggarakan sesuai standar mutu pendidikan. Secara kelembagaan, yang berperan dalam mengawal kegiatan penjaminan mutu pendidikan secara internal dan eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) memberikan

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dalam rangka pencapaian standar Pendidikan Nasional. Di tingkat daerah terdapat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang mempunyai tugas untuk mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan siklus manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan mengukur, mengevaluasi, dan mengawal mutu komponen-komponen pembelajaran yang sudah dituangkan dalam standar pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam hal ini, mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu manajemen proses pembelajaran yang optimal di satuan pendidikan.

Acuan mutu kinerja penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan (SNP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Indikator dan komponen dari masing-masing SNP dan SPM yang belum dicapai oleh setiap satuan pendidikan akan dijadikan sebagai prioritas dalam melakukan perbaikan-perbaikan (program peningkatan mutu). Dalam hal ini pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan dan penataan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sistem yang lebih rasional, efisien dan transparan dalam melaksanakan pembangunan sumber daya manusia dan penataan pendidikan masa depan.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Salah satu bentuk pendidikan nasional pada jenjang menengah, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti ditegaskan pada Pasal 15 yakni; “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Tujuan SMK dapat diuraikan Menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi, Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk dapat mengisi lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja terutama di bidang, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi intinya lulusan SMK harus “mampu bekerja, mandiri/ mampu berwirausaha, dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.”

Fungsi dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan harus diselenggarakan secara sistematis agar tujuan tersebut dapat dicapai. Mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator. Beberapa indikator mutu hasil pendidikan diantaranya adalah nilai Ujian Nasional (UN), persentase kelulusan, angka *drop out* (DO), angka mengulang kelas, persentase lulusan yang bekerja, lulusan yang mampu berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi ukuran keberhasilan tersebut belum bisa dicapai di SMK. Pernyataan tersebut sangat dilematis. Di satu pihak, begitu banyak persoalan yang sedang dan akan dihadapi SMK karena pemerintah akan memperbanyak pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta mengurangi pengembangan dan jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) sehingga pada tahun 2009 rasio perbandingan SMK dan SMU menjadi 60:40, dengan target tahun 2020 menjadi 70:30. Di pihak lain mutu lulusan masih sangat rendah, persoalan akan bertambah rumit karena penyerapan tenaga kerja tidak akan seimbang dengan keluaran sehingga akan menyebabkan tingkat pengangguran yang makin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan bulan Agustus 2011, menyatakan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

mencapai 117,4 juta orang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 6,56 % atau 7,70 juta, dimana sebanyak 3,07 juta adalah lulusan SLTA dan SMK. Dengan perbandingan jumlah antara SMA dan SMK di Indonesia 51:49 dapat diartikan bahwa jumlah TPT untuk lulusan SMA kurang lebih mencapai 1,56 juta dan jumlah TPT untuk lulusan SMK 1,51 juta.

Di Jawa Barat, angka pengangguran terbuka untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut golongan umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penduduk Jawa Barat Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

	PERKOTAAN+PEDESAAN				LAKI- LAKI+PEREMPUAN			
	Gol.Umur	Td/blm pernah sekolah	Td/blm tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Dipl. I/II/III Akademi Universitas	Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Agust. 2007	15-19	2.833	18.349	213.628	241.863	189.207	1.120	667.000
Agust. 2008	15-19	-	15.768	190.374	218.131	204.584	270	629.127
Agust. 2009	15-19	3.231	26.659	158.548	208.099	210.457	998	607.992
Agust. 2010	15-19	1.220	17.640	181.599	230.803	208.814	1.697	641.733

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Agust 2011 15-19	1.556	14.341	181.599	221.376	201.478	1.392	641.733
------------------	-------	--------	---------	---------	---------	-------	---------

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Jakarta Agustus 2012.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tamatan SLTA (SMA/SMK/MA) di Jawa Barat yang menganggur mencapai 201.478 orang. Ini berarti bahwa tamatan SMK yang menganggur adalah sekitar 100.000 lulusan.

Menurut Balibang Puskur (2010), untuk mengurangi angka pengangguran, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah perlu dikembangkannya karakter kewirausahaan sedini mungkin, karena suatu bangsa akan maju apabila jumlah wirausahanya paling sedikit 2% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2007, jumlah wirausaha di Singapura ada sebesar 7,2%, Amerika Serikat 2,14%, Indonesia yang mana jumlah penduduknya kurang lebih sebesar 220 juta, jumlah wirausahanya sebanyak 400.000 orang (0,18%), yang seharusnya sebesar 4.400.000 orang. Berarti Indonesia kekurangan sebesar 4 Juta orang wirausaha.

Arifah (2013:8) menjelaskan bahwa pada dasarnya lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), walaupun secara skematik mereka dapat menjadi pekerja atau berwirausaha. Kurang lebih 20 persen lulusan SMK pada tahun 2012-2013 telah melanjutkan ke perguruan tinggi. Lulusan tersebut berebut kursi Perguruan Tinggi dengan lulusan SMA/MA.

Beberapa fenomena tersebut menjadi ukuran bahwa mutu lulusan SMK secara umum relatif rendah. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah lulusan dari SMK swasta atau negeri dengan kategori biasa (belum SSN), SMK dengan kategori standar (SSN) .atau sekolah dengan kategori unggulan.

Langkah dan upaya pemerintah dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu sebagai wujud dari amanat Undang-Undang, Peraturan serta kebijakan makro dan mikro di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah mengkategorikan sekolah dengan status/predikat Sekolah Standar Nasional (SSN) yang telah mendapat Akreditasi A yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nasional (BAN) serta mendapat pengakuan dari Direktorat PSMK dan mendapat prioritas dalam mendapat bantuan kegiatan pengembangan. Kategori lainnya adalah sekolah unggulan dengan penunjukan dan penetapan dengan kriteria khusus yakni SMK Eks. RSBI. Konsep “Sekolah Unggulan” mengisyaratkan sebuah sistem pendidikan yang menggunakan standar pada sistem pendidikan di tingkat Internasional. Perbedaan Eks. SMK RSBI terletak dalam sistem pengelolaan, dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan bahasa pengantar, lebih intensif dalam pengembangan kerja sama industri, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk meningkatkan standar kualitas peserta didik yang nantinya berdampak pula pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Visi Sekolah Unggulan adalah untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara internasional. Visi tersebut memiliki implikasi bahwa penyiapan manusia bertaraf internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif dan terarah. SMK dengan kategori unggulan Eks RSBI telah dibubarkan oleh MK yang dianggap adanya diskriminasi dalam Pengelolaan dan pengembangannya.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai mutu pendidikan dengan fokusnya pada mutu manajemen proses pembelajaran. Adapun objek yang diteliti adalah SMK dengan kategori SSN dan SMK Eks RSBI di Jawa Barat. Dari uraian tersebut, SMK sangat memegang peran strategis dalam mempersiapkan tenaga lulusan agar dapat bekerja atau berwirausaha. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Balitbang Puskur, 2010), ditemukan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh *hard skill* dan sisanya 80% oleh *soft skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter termasuk karakter kewirausahaan peserta didik sangat penting untuk segera ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan mutu manajemen proses pembelajaran dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar perlu

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Nasional Summit Tahun 2010 telah mengamanatkan perlunya penggalakan jiwa kewirausahaan dan metodologi pendidikan yang lebih mengembangkan kewirausahaan. Hal ini diperkuat dalam Buku pedoman Pelaksanaan Pendidikan Budaya karakter bangsa bahwa pembentukan karakter kewirausahaan bisa dicapai melalui peningkatan mutu manajemen proses pembelajaran, khususnya pembelajaran aktif. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan, Pasal 4 butir (d) kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan, butir (e) tingkat kemandirian serta daya saing. Hal ini bisa dibangun melalui peningkatan mutu manajemen proses pembelajaran aktif. Bertitik tolak dari uraian tersebut maka yang akan menjadi pocus penelitian ini adalah mutu manajemen proses pembelajaran yang menjadi variabel terikat. Dalam hal ini, proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dalam kaitannya dengan kegiatan peserta didik, Sudjana (2002:41) selanjutnya karena pembelajaran yang bermutu sangat dipengaruhi pembelajaran aktif, maka yang menjadi variabel terikat termasuk pembelajaran aktif. Berdasarkan uraian mengenai komponen-komponen pendidikan yang meliputi 8 (delapan) standar, dimana pengukuran dan penetapan kualitas tersebut dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan berlandaskan teori yang dikemukakan Hoy & Miskel (2001), bahwa sekolah sebagai sistem sosial meliputi : input ,proses dan out put yang diadaptasikan dengan 8 komponen standar pendidikan , maka dalam penelitian ini menetapkan komponen dominan yang mempengaruhi mutu manajemen proses pembelajaran sebagai variabel input yang meliputi: Kinerja Kepala Sekolah, Sarana Prasarana, Manajemen, Kemitraan, Pembiayaan, dan Implementasi kurikulum sebagai Variabel input. Adapun sebagai variabel proses adalah variabel mutu pembelajaran yang meliputi: Kinerja Tenaga pendidik, Perilaku Peserta Didik dan Mutu Manajemen Proses Pembelajaran.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam pendekatan sistem, mutu kinerja sekolah tersebut juga tidak terlepas dari input yang memengaruhinya. Terlepas dari mutu inputnya, kinerja sekolah yang bermutu dapat menjadikan output yang bermutu, salah satunya yaitu manajemen proses pembelajaran yang bermutu di lingkungan sekolah, apalagi bila didukung oleh input yang bermutu pula. Di pihak lain, apabila input pendidikan itu tergolong baik, tetapi manajemen proses pembelajaran tidak bermutu, maka outputnya juga diprediksi tidak akan bermutu. Oleh karena itu, dalam pendekatan sistem diperlukan integrasi antara unsur-unsur input, proses, dan outputnya.

Mutu manajemen proses pembelajaran ini merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baik buruknya atau tinggi rendahnya mutu manajemen proses sangat bergantung pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah bersama-sama dengan guru. Mutu manajemen proses pembelajaran di kelas, menurut Colby & Witt (2000: 4), melibatkan interaksi antara peserta didik (siswa) dan pendidik (guru) sebagai pembelajar (*learners*) sebagai komponen utama proses pembelajaran. Mutu manajemen proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh berbagai variabel input.

Terdapat banyak model yang menggambarkan mutu manajemen proses pembelajaran, seperti Carrol (1963), Loree (1970), Dunkin & Biddle (1974), Shulman (1984), Proctor (1984), Cruickshank (1985), Gage & Berliner (1992), Huitt (1995), Al-Turki & Duffuaa (2003), dan Becket & Brookes (2008). Dalam proses pembelajaran, menurut Carrol (1963), pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut (pendidik, peserta didik, dan administrator), perlu mengelola alokasi waktu untuk pembelajaran (*time allocated for learning at school*), yang menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan oleh peserta didik untuk belajar itu sejalan dengan sikap, kemampuan untuk memahami materi yang diajarkan (*prerequisite knowledge*) dan mutu pembelajaran itu sendiri yang didapatkan siswa dalam proses pembelajaran yang dikelola guru dan kepala sekolah.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Loree (1970:133) mengungkapkan bahwa proses belajar mengajar dapat dibentuk oleh tiga komponen input, yaitu komponen *raw input* (usia, latar belakang pendidikan, kapasitas IQ, bakat khusus, motivasi, minat, kematangan, kesiapan, sikap, kebiasaan, dan sebagainya), instrumental input (guru, instruktur, materi, media pembelajaran, metode, bahan, sumber, sarana/prasarana) dan *environmental input* (lingkungan sosial, fisik dan budaya), dalam rangka mencapai hasil belajar yang diharapkan (*expected output*), yang semuanya itu harus dikelola secara efektif dan efisien oleh kepala sekolah.

Mengacu pada penelitian Dunkin & Biddle (1974) dan Shulman (1984), proses pembelajaran, sebagai variabel proses, merupakan interaksi antara perilaku pendidik dengan perilaku peserta didik, dengan tujuan mengamati perubahan perilaku peserta didik. Interaksi tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh kepala sekolah bersama-sama dengan guru (*headteacher*). Variabel proses ini ditentukan oleh (1) *presage variables* (variabel pendahulu), yaitu pendidik dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, kompetensi, dan kinerjanya; dan (2) *context variable* (variabel konteks), yaitu pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi peserta didik, yang disertai dengan iklim dan suasana belajar (lingkungan pembelajaran), serta kelengkapan fasilitas belajar dalam konteks lokasi tempat berlangsungnya interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Semuanya itu mengarah pada terwujudnya *product variables* (variabel-variabel produk), yang mengacu pada produk jangka menengah dan jangka panjang.

Model yang dihasilkan dari penelitian Proctor (1984) menyatakan bahwa keberhasilan guru dan peningkatan perilaku siswa dalam proses pembelajaran sangat didukung oleh keterlibatan variabel input kepala sekolah dalam mengelola faktor lingkungan (budaya dan iklim sekolah). Mutu manajemen proses pembelajaran dalam hal ini sangat menentukan mutu output pembelajaran.

Al-Turki & Duffuaa (2003) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendekatan manajemen untuk mengukur produktivitas, efisiensi, efektivitas, Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

struktur internal, pertumbuhan dan perkembangan dari proses pembelajaran dapat meningkatkan peluang keberhasilan output pembelajaran. Dalam hal ini model pengukuran kinerja manajemen pembelajaran didasarkan pada pengukuran setiap kategori, yaitu pengukuran input, proses, dan output.

Becket & Brookes (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa guru dan siswa dipandang sebagai bagian terpadu dalam proses pembelajaran yang harus dikelola secara efektif dan efisien dalam mencapai mutu output pendidikan. Karakteristik guru dan karakteristik siswa harus dibina dan dikelola sedemikian rupa sehingga nilai-nilai budaya sekolah dapat terjaga, kinerja guru dapat meningkat, keterampilan guru bertambah, kepribadian guru dapat menjadi penentu keberhasilan pendidikan. Di samping itu, prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan adanya pengendalian yang ketat dari administrator. Dapat disimpulkan bahwa manajemen proses pembelajaran yang bermutu dapat meningkatkan output pendidikan yang diharapkan. Mutu manajemen proses pembelajaran itu sendiri tidak terlepas dari berbagai faktor dominan yang mempengaruhinya.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terdapat banyak permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan dan persekolahan saat ini yang dapat diidentifikasi, mulai dari kebijakan, kualitas pendidikan, sampai ujian nasional. Muara permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan adalah pada mutu manajemen proses pembelajaran di sekolah yang dipengaruhi oleh komponen-komponen input dan proses pembelajaran. Sesuai dengan fokus penelitian, beberapa permasalahan yang diuraikan berikut ini diawali dengan persoalan utama yang menyangkut mutu manajemen proses pembelajaran dan komponen-komponen utama yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan mutu manajemen proses pembelajaran. Beberapa permasalahan yang mengemuka pada saat ini, menurut Balitbang Puskur (2010: 3-Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

4) adalah: (1) Terbentuknya opini di masyarakat bahwa nilai ujian nasional seolah-olah menggambarkan prestasi belajar secara utuh; (2) Belajar yang terpisah-pisah baik antarmata pelajaran maupun antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya sehingga proses belajar-mengajar tidak berpusat pada peserta didik; (3) Proses belajar-mengajar yang belum mampu mendorong timbulnya kreativitas peserta didik; (4) Terbatasnya sumber daya yang tersedia; (5) Banyak peserta didik berasal dari keluarga atau orang tua yang masih menunjukkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, sehingga dukungan pada peserta didik masih terbatas; (6) Banyak guru belum terlatih secara baik dalam melaksanakan belajar aktif; dan (7) Banyak peserta didik yang watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian serta sistem berpikirnya belum sejalan dengan moral dan norma ke-Indonesi-an.

Dalam konteks administrasi pendidikan, menurut Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI (2007:42), manajemen merupakan sesuatu dari kegiatan yang menuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegiatan tersebut pada intinya didasarkan pada tiga macam fungsi manajemen, yaitu: (1) perencanaan (*planning*), (2) pelaksanaan (*execution/implementation*), dan (3) penilaian (*evaluation*). Manajemen proses pembelajaran, menurut Daryanto (2013:312) merupakan pengelolaan proses pembelajaran yang utuh dan menyeluruh dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran, termasuk evaluasi programnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Keberhasilan program pembelajaran dalam hal ini sangat ditentukan oleh mutu manajemen proses pembelajaran itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan, mengacu pada PP No. 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran yang sedang dikembangkan, maka lingkup kegiatan untuk terlaksananya manajemen proses pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi: “(1) perencanaan proses pembelajaran, (2) pelaksanaan proses pembelajaran, (3) penilaian hasil pembelajaran, dan (4) pengawasan proses pembelajaran”.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keempat lingkup kegiatan dalam standar proses pembelajaran tersebut, dijelaskan oleh Muljono (2006:31-32) sebagai berikut:

1. Standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah dan terukur dari jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara berkesinambungan. Sistemik berarti mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang mencakup fakta, konsep, prosedur, dan prinsip, kondisi lingkungan dan hal-hal lain yang menghambat atau mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip intensitas interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik dan antara peserta didik dengan aneka sumber belajar. Untuk itu perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas, beban pembelajaran maksimal pendidik, dan ketersediaan buku teks pelajaran bagi peserta didik. Di samping itu perlu dipertimbangkan bahwa proses pembelajaran bukan sekedar menyampaikan ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka juga perlu ditentukan tentang rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Perihal kemampuan pengelolaan kegiatan belajar dan pembelajaran pendidik, juga sesuatu yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Teknik yang dimaksud dapat berupa tes tertulis, observasi, uji praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat digunakan teknik penilaian portofolio atau kolokium. Secara umum penilaian dilakukan untuk mengukur semua aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan mengacu dan sesuai dengan standar penilaian.

4. Standar pengawasan proses pembelajaran adalah upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran efektif dan efisien ke arah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, dilakukan secara periodik, demokratis, terbuka, berkelanjutan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. Upaya pengawasan terhadap proses pembelajaran pada hakikatnya adalah tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, pengawas, dan sejawat atau pihak lain yang ditugasi untuk melaksanakan pengawasan secara internal.

Berbagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran tersebut tidak terlepas dari komponen-komponen proses pembelajaran, yang mencakup proses pembelajaran yang (1) aktif, (2) interaktif, (3) inspiratif, (4) menyenangkan, (5) menantang, dan (6) memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian (bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik). Semua itu juga tidak terlepas dari komponen utama dalam manajemen proses pembelajaran, yaitu tenaga pendidik dan peserta didik.

Menurut Balitbang Puskur (2010: 5-6) Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tenaga pendidik antara lain bahwa proses belajar-mengajar yang berlangsung selama ini belum mampu mendorong timbulnya kreativitas peserta didik karena pola belajar masih teacher centered, artinya proses belajar-mengajar tidak berpusat pada peserta didik. Banyak guru belum terlatih secara baik dalam melaksanakan belajar aktif. Hal ini juga diakibatkan oleh terbatasnya sumber

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

daya yang tersedia. Guru juga belum sepenuhnya menanamkan diskusi dua arah dengan peserta didik. Guru jarang mengajak anak berkeliling sekolahnya untuk belajar. Guru juga jarang membawa siswanya melakukan percobaan di alam lingkungan sekitar dan guru jarang membawa seorang ilmuwan langsung datang di kelas untuk menjelaskan profesinya. Masalah lain berkaitan dengan kemampuan guru dalam mempersiapkan materi mulai dari penyusunan RPP sampai membuat bahan belajar untuk melaksanakan pembelajaran aktif masih relatif rendah. Masalah lainnya adalah perekrutan dan penempatan tenaga pendidik, yaitu bahwa belum sepenuhnya pelaksanaan peraturan perundangan terkait perekrutan dan penempatan tenaga pendidik serta masih adanya tenaga pendidik tidak relevan dengan latar belakang pendidikan. Pembangunan dan pengembangan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat perlu didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik adalah rendahnya motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik sangat bergantung pada rasa percaya diri atau potensi belajarnya dan kemampuan guru mengantarkan peserta didik mengenali bakat dan potensi dirinya (motivasi ekstrinsik) sehingga tumbuh keyakinan untuk percaya kepada keunikan dirinya dan mampu mengekspresikannya (motivasi intrinsik). Masalah lain, khususnya di SMK, adalah latar belakang siswa umumnya dari kelas menengah ke bawah. Hal ini memberikan kendala tingkat kecerdasan dan kepercayaan diri serta tanggung jawab belajar relatif kurang. Tanggung jawab belajar selalu harus semakin bergantung kepada peserta didik dan ditekankan agar peserta didik mengkonstruksi pengertian atau konsepnya sendiri. Untuk itu, perlu ditempuh pemberian peran kepada peserta didik menjadi peserta didik pembelajar atau peserta didik pengajar. Banyak peserta didik berasal dari keluarga atau orang tua dengan kelas menengah ke bawah ini menunjukkan rendahnya kesadaran

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

mengenai pentingnya pendidikan, sehingga dukungan pada peserta didik masih terbatas. Permasalahan peserta didik tersebut menuntut penyelenggara pendidikan untuk lebih melibatkan mereka dalam memperbaiki masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNESCO & ILO. (2002:40) bahwa:

The learners' performance should be evaluated/assessed on an overall basis that considers class participation, interests and attitude, aptitude for acquiring practical skills and competencies, and relative progress, allowance being made for aptitudes and examinations and other tests. Learners should participate in the evaluation/assessment of their own progress, and this system should have an in-built feedback mechanism to identify and correct learning problems.

Permasalahan utama dalam mutu manajemen proses pembelajaran yang melibatkan kinerja tenaga pendidik dan perilaku peserta didik itu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berikut diuraikan beberapa permasalahan yang mempengaruhi mutu manajemen proses pembelajaran, kinerja tenaga pendidik, dan perilaku peserta didik.

Permasalahan Pertama: Kepala Sekolah

Berkaitan dengan pentingnya posisi kinerja sekolah yang bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat diteliti mengenai faktor utama yang mempengaruhi mutu kinerja sekolah, yaitu kinerja kepala sekolah sebagai faktor pemicu (driver) terciptanya kinerja sekolah yang bermutu dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran di SMK yang termasuk pada sekolah unggulan (eks. RSBI) dan SSN. Kepala Sekolah harus mampu melaksanakan program-program sekolah yang mereka bina secara efektif. Hal ini, mengingat kepala sekolah tidak saja bertanggung jawab mengelola guru, murid, dan orang tua, tetapi juga harus menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat luas. Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan keterampilan kepemimpinan agar dapat meningkatkan mutu manajemen proses dan efektivitas pembelajaran.

Di lain pihak, di lapangan masih ditemui berbagai persoalan berkaitan dengan peran dan tugas Kepala Sekolah di lapangan. Sriyulianti (2008:14) menyatakan bahwa perekrutan kepala sekolah memang tidak profesional. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya sekolah yang tidak berkualitas. Ia memberi contoh perekrutan kepala sekolah di salah satu Kabupaten di Jawa Barat, yang cenderung tertutup. Proses yang tertutup seperti itu ditegaskannya bisa saja terjadi di tempat lain dan dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan manajemen dan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk memperbaikinya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan penuh bupati atau wali kota. Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau walikota seenaknya menentukan kepala sekolah. Selain itu, proses pengangkatannya jarang disertai pelatihan. Kepala daerah dalam hal ini diharapkan dapat kembali menggunakan standar kompetensi dalam memilih dan mengangkat kepala sekolah.

Masalah lain pada proses pengangkatan Kepala Sekolah adalah tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat serta kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat, wawasan kepala sekolah yang masih sempit, serta banyak faktor penghambat lainnya yang menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini mengimplikasikan rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu (input, proses, dan output).

Permasalahan Kedua: Pembiayaan

Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi, Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, semua itu memerlukan anggaran dan keuangan. Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan semua substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Dari segi Pembiayaan Pendidikan, masih terdapat biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat miskin. Selain itu, muncul juga masalah yang berakar dari belum tepatnya dasar alokasi pemberian bantuan pendidikan. Masalah Penganggaran ditandai oleh belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran menengah.

Dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah membutuhkan biaya tertentu. *Jer basuki mawa bea*. Untuk itu manajemen keuangan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan yang lain bisa dilaksanakan dengan lancar. Sehubungan dengan itu, calon kepala sekolah yang akan bertugas mengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Masalah yang sering mengemuka berkaitan dengan keuangan khususnya terbatasnya anggaran untuk biaya operasional praktek sehingga untuk mencapai kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum sulit tercapai. Masalah lain yang sering terjadi di sekolah adalah masalah transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

Permasalahan Ketiga: Kemitraan

Salah satu faktor penyebabnya rendahnya mutu manajemen proses pembelajaran ditandai dengan kurangnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak-anaknya bersekolah. Padahal apabila dikaji lebih lanjut beberapa komponen penentu peningkatan mutu sekolah antara lain adalah pemberdayaan
Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat. Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite sekolah, dewan pendidikan maupun masyarakat secara umum. Di sekolah Menengah Kejuruan peran dan kontribusi industri sangat penting karena seyogianya dunia usaha dan industri membantu sekolah mulai dari perencanaan program, pelaksanaan sampai evaluasi dalam bentuk uji kompetensi pemberian sertifikasi. Dalam masyarakat industri pekerjaan-pekerjaan hanya bagi pemegang sertifikat/diploma. Pekerjaan akan diberikan kepada mereka yang memiliki sertifikat tertentu, sehingga sertifikat merupakan sesuatu yang sangat berharga. Pemegang sertifikat akan memiliki prestise tertentu. Dalam masyarakat dengan sistem kompetisi dalam menentukan jenjang karier, sertifikat tersebut merupakan ukuran tertentu bagi pencari pekerjaan. Dalam kondisi inilah sekolah harus mempersiapkan kemampuan-kemampuan peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang mungkin dapat dilakukannya di masyarakat masa akan datang.

Namun demikian kenyataannya masih jauh, industri belum terlibat secara aktif dalam membantu perencanaan program. Praktek Industri bagi para siswa belum memperoleh dukungan secara maksimal, kehadiran siswa praktek dinilai kebermanfaatan dalam waktu pendek serta belum sinergi dalam melakukan uji kompetensi dan pemberian sertifikasi bagi para siswa (Bukit, 2005:2).

Permasalahan Keempat: Manajemen

Sekolah sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan itu penting di semua tingkat kerjasama yang dikoordinasi, di semua tingkat organisasi, yang mana pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah. Kendala dan masalah dapat muncul pada setiap kegiatan manajemen. Padahal manajemen merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Oleh karena itu bagaimana upaya sekolah untuk

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengurangi kendala dan memecahkan masalah merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di masing-masing sekolah. Manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen keuangan. Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi, penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, kesemua itu memerlukan anggaran dan keuangan (Campbell, et al. 1996:82).

Permasalahan Kelima: Sarana Prasarana

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dewasa ini permasalahan masih sering ditemukan kurang memadainya khususnya untuk SMK fasilitas praktek untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum serta sesuai dan relevan dengan fasilitas kemajuan industri dan lapangan pekerjaan sangat ketinggalan, di samping permasalahan dalam pemberdayaan dan optimalisasi oleh sekolah banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.

Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda pula

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana.

Permasalahan Keenam: Implementasi Kurikulum

Masalah lain juga adalah masalah keselarasan program pendidikan dan lapangan pekerjaan, yang ditandai dengan belum selarasnya program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja mengimplementasikan KTSP dalam proses pembelajaran mencakup, (1) pengembangan dan pelaksanaan KTSP di sekolah, memberdayakan porsonil sekolah dan keterlibatan *stakeholders*, (2) KTSP dikembangkan dan dilaksanakan sesuai kondisi sekolah dan daerah tetapi KTSP tetap mengacu pada standar pendidikan nasional, (3) implementasi KTSP menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, (4) implementasi KTSP menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, (5) implementasi KTSP sekolah menyelenggarakan peningkatan kualitas dan sumber daya guru, (6) implementasi KTSP menjalin kerja sama dengan DUDI. Kedua, upaya guru mengimplementasikan KTSP dalam proses pembelajaran adalah, (1) guru melakukan persiapan pembelajaran yaitu dalam bentuk RPP, (2) guru melakukan proses pembukaan atau langkah awal dalam proses pembelajaran, (3) guru melakukan proses pembentukan kompetensi siswa atau kegiatan inti dalam proses pembelajaran, dan (4) pada akhir proses pembelajaran guru melakukan kegiatan menutup pelajaran. Implementasi kurikulum 2013 yang belum sepenuhnya disosialisasikan juga merupakan tantangan bagi pihak sekolah untuk mengatasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan mutu manajemen proses pembelajaran, yang di dalamnya terdapat interaksi antara kinerja tenaga pendidik dan perilaku peserta didik, yang semuanya itu dipengaruhi oleh faktor kinerja kepala sekolah, pembiayaan,

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemitraan/peran serta masyarakat, manajemen sekolah, sarana-prasarana, dan implementasi kurikulum, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu manajemen proses pembelajaran

2. Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah apakah komponen-komponen yang meliputi (1) Kinerja Kepala Sekolah; (2) Pembiayaan; (3) Kemitraan/Peran Serta Masyarakat; (4) Manajemen Sekolah; (5) Sarana/prasarana; (6) Implementasi kurikulum; (7) Kinerja Tenaga Pendidik; dan (8) Perilaku Peserta Didik memiliki pengaruh terhadap Mutu Manajemen Proses Pembelajaran pada sekolah unggulan (eks RSBI) dan sekolah standar (SSN) di Jawa Barat. Secara spesifik rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana gambaran empirik komponen-komponen (1) Kinerja Kepala Sekolah; (2) Pembiayaan; (3) Kemitraan/Peran Serta Masyarakat; (4) Manajemen Sekolah; (5) Sarana/prasarana; (6) Implementasi kurikulum; (7) Kinerja Tenaga Pendidik; (8) Perilaku Peserta Didik dan (9) Mutu Manajemen Proses Pembelajaran pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat.
2. Apakah variabel input yang meliputi (1) Kinerja Kepala Sekolah; (2) Pembiayaan; (3) Kemitraan/Peran Serta Masyarakat; (4) Manajemen Sekolah; (5) Sarana/prasarana; (6) Implementasi kurikulum berpengaruh terhadap variabel proses Kinerja Tenaga Pendidik pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
3. Apakah variabel input yang meliputi (1) Kinerja Kepala Sekolah; (2) Pembiayaan; (3) Kemitraan/Peran Serta Masyarakat; (4) Manajemen Sekolah; (5) Sarana/prasarana; (6) Implementasi kurikulum berpengaruh terhadap variabel proses Perilaku Peserta Didik pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Apakah variabel Kinerja Tenaga Pendidik dan Perilaku Peserta Didik berpengaruh terhadap Mutu Manajemen Proses Pembelajaran pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Adakah perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu manajemen proses pembelajaran pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui keterkaitan antara kinerja kepala sekolah, pembiayaan sekolah, kemitraan/peran serta masyarakat, manajemen sekolah, sarana/prasarana, implementasi kurikulum, tenaga pendidik, perilaku peserta didik dan mutu manajemen proses pembelajaran. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi empirik mengenai kinerja kepala sekolah, pembiayaan sekolah, kemitraan/peran serta masyarakat, manajemen sekolah, sarana/prasarana, implementasi kurikulum, kinerja tenaga pendidik, perilaku peserta didik dan mutu manajemen proses pembelajaran di SMK berstandar nasional (SSN) dan sekolah unggulan Eks. RSBI di Jawa Barat.
2. Menganalisis dan mengukur pengaruh kinerja kepala sekolah, pembiayaan sekolah, kemitraan/peran serta masyarakat, manajemen sekolah, sarana/prasarana, implementasi kurikulum terhadap kinerja tenaga pendidik di SMK berstandar nasional (SSN) dan sekolah unggulan Eks. RSBI di Jawa Barat.
3. Menganalisis dan mengukur pengaruh kinerja kepala sekolah, pembiayaan sekolah, kemitraan/peran serta masyarakat, manajemen sekolah, sarana/prasarana, implementasi kurikulum terhadap perilaku peserta didik di SMK berstandar nasional (SSN) dan sekolah unggulan Eks. RSBI di Jawa Barat.
4. Menganalisis dan mengukur kinerja tenaga pendidik dan perilaku peserta didik terhadap mutu manajemen proses pembelajaran di SMK berstandar nasional (SSN) dan sekolah unggulan Eks. RSBI di Jawa Barat.
5. Menganalisis perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu manajemen proses pembelajaran pada sekolah unggulan dan sekolah standar di Jawa Barat.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis bagi sekolah, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan informasi untuk dapat memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan mutu manajemen proses pembelajaran di SMK. Bagi sekolah menengah kejuruan yang sudah ada, kajian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu manajemen proses pembelajaran.

Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi ilmu administrasi pendidikan, khususnya berkaitan dengan manajemen mutu kinerja sekolah. Temuan-temuan ini dapat dijadikan bahan pengembangan teoretis, atau dijadikan bahan kajian untuk mengkaji berbagai teori yang selama ini telah terakumulasi, sehingga dapat melahirkan kembali temuan ilmiah yang lebih produktif.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Penyusunan disertasi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

- Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Disertasi.
- Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis, yang mendeskripsikan beberapa konsep, teori dan pendekatan yang berkaitan dengan administrasi pendidikan, pendidikan kejuruan, mutu kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan mutu pembelajaran dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, asumsi, dan hipotesis.
- Bab III merupakan Metode Penelitian yang memuat pendekatan dan desain penelitian, definisi operasional operasionalisasi variabel, sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang di dalamnya terdapat hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan rancangan analisis data.

- Bab IV adalah Hasil Penilaian dan Pembahasan yang merupakan deskripsi dari temuan yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan membahas hasilnya sesuai dengan konsep yang ada.
- Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Yayat Sudaryat, 2013

MUTU MANAJEMEN PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (Studi Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Mutu Manajemen Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Kategori Sekolah Berstandar Nasional dan Unggulan (Eks RSBI) Bidang keahlian Teknologi Rekayasa di Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu